Community Engagement & Emergence Journal
Volume 7 Nomor 6, Tahun 2026
Halaman : 5172-5186

Pengaruh Perencanaan Anggaran Terhadap Kinerja Pembangunan Daerah Dengan Efektivitas Realisasi Anggaran Sebagai Variabel Mediasi Pada Pemerintah Kota Surakarta Periode 2020–2024

The Effect Of Budget Planning On Regional Development Performance With Budget Realization Effectiveness As A Mediating Variable In The Surakarta City Government, 2020–2024

Aghnia Fadilla[a]*, Wuryaningsih Dwi Lestari[b]
Universitas Muhammadiyah Surakarta[a,b]
[a]b100230066@student.ums.ac.id*, [b] wdl126@ums.ac.id

Abstract
This study aims to analyze the effect of budget planning on regional development performance, the effect of budget realization effectiveness on regional development performance, and the mediating role of budget realization effectiveness in the relationship between budget planning and regional development performance in the Surakarta City Government for the 2020-2024 period. This study employs a quantitative approach using secondary data from Regional Budget (APBD), Budget Realization Reports, as well as indicators of HDI, poverty rate, and economic growth. Analytical methods include descriptive statistic, multiple linear regression, and the Sobel test. The results show that budget planning has a significant effect on HDI and poverty rate, but not on economic growth. Budget realization effectiveness has no significant effect on any of the three performance indicators. The Sobel test confirms that budget realization effectiveness does not act as a mediating variable. Thus, the causal chain between budget planning, budget realization effectiveness, and regional development performance in Surakarta City for 2020-2024 period is broken.
Keywords: *Budget Planning, Effectiveness of Budget Realization, Regional Development Performance, Surakarta City.*

Abstrak
Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh perencanan anggaran terhadap kinerja pembangunan daerah, pengaruh efektivitas realisasi anggaran terhadap kinerja pembangunan daerah, serta peran mediasi efektivitas realisasi anggaran pada Pemerintah Kota Surakarta periode 2020-2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder dari APBD, Laporan Realisasi Anggaran, serta indikator IPM, kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi. Metode analisis meliputi statistik deskriptif, regresi linear berganda, dan uji Sobel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh signifikan terhadap IPM dan kemiskinan, tetapi tidak terhadap pertumbuhan ekonomi. Efektivitas realisasi anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap ketiga indikator kinerja. Uji Sobel membuktikan bahwa efektivitas realisasi anggaran tidak berperan sebagai variabel mediasi. Dengan demikian, rantai kausal antara perencanaan, realisasi,dan kinerja pembangunan di Kota Surakarta periode 2020-2024 terputus.
Kata Kunci: Perencanaan Anggaran, Efektivitas Realisasi Anggaran, Kinerja Pembangunan Daerah, Kota Surakarta.

1. Pendahuluan

Desentralisasi fiskal di Indonesia menempatkan pengelolaan keuangan daerah sebagai salah satu aspek penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berfungsi sebagai instrumen pembiayaan program pembangunan dan pelayanan publik, sehingga kualitas perencanaan dan efektivitas realisasinya berpotensi memengaruhi capaian pembangunan masyarakat. Haraldsson (2024) menegaskan bahwa integrasi pengelolaan anggaran dengan target kinerja dapat meningkatkan kualitas layanan

e-ISSN:2715-9752, p-ISSN:2715-9868
Copyright © 2026 THE AUTHOR(S). This article is distributed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license

publik. Namun, konsistensi antara perencanaan dan realisasi anggaran masih menjadi tantangan di berbagai daerah, termasuk Kota Surakarta. Alokasi belanja daerah meningkat dari Rp2.109,29 miliar pada 2020 menjadi Rp2.437,74 miliar pada 2024, sedangkan tingkat realisasinya berfluktuasi, yaitu 77,74% pada 2020, 94,52% pada 2021, 93,26% pada 2022, 83,63% pada 2023, dan 90,24% pada 2024. Fenomena serupa ditemukan oleh Wiranto et al. (2025) di Kota Jambi dan Nurhidayah et al. (2024) pada Dinas Pendidikan Kota Surakarta, yang menunjukkan bahwa efektivitas realisasi anggaran masih menjadi persoalan dalam pengelolaan keuangan pemerintah.

Fluktuasi realisasi anggaran tersebut terjadi bersamaan dengan perkembangan indikator pembangunan daerah yang beragam. Pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta mengalami kontraksi sebesar 1,76% pada 2020 sebelum pulih dan kembali melambat pada 2023, sedangkan tingkat kemiskinan meningkat dari 9,03% pada 2020 menjadi 9,40% pada 2021, kemudian menurun menjadi 8,31% pada 2024. Di sisi lain, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 82,21 menjadi 84,41 selama periode 2020–2024. Berdasarkan SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/252 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2024, realisasi belanja barang dan jasa tercatat sebesar 86,00%, sementara sejumlah subkegiatan belum menyerap anggaran secara optimal. Selain itu, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai belum optimalnya pelaksanaan anggaran dan manajemen kas serta nilai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp291,89 miliar pada 2020 memperkuat indikasi adanya tantangan dalam pengelolaan anggaran. Kondisi tersebut memunculkan dugaan bahwa peningkatan alokasi anggaran belum sepenuhnya diikuti oleh realisasi yang optimal maupun capaian pembangunan yang sebanding. Kelemahan perencanaan, ketidaksesuaian alokasi dengan kebutuhan, serta kendala pelaksanaan berpotensi memengaruhi efektivitas penggunaan anggaran (Anandah & Aufa, 2023; Aziz & Fitriaty, 2023; Roes, 2022). Selain itu, efektivitas realisasi anggaran diduga menjadi mekanisme yang menghubungkan perencanaan dengan kinerja pembangunan, sebagaimana dikaji oleh Putri et al. (2024), dengan komitmen organisasi dan kualitas dokumen perencanaan sebagai faktor yang juga berpotensi memengaruhi penyerapan anggaran (Alif'ia et al., 2025; Fasihu et al., 2025).

Penelitian terdahulu telah mengkaji hubungan perencanaan anggaran, realisasi anggaran, dan kinerja pemerintah, tetapi menghasilkan temuan yang belum sepenuhnya konsisten. Anandah dan Aufa (2023) serta Wiranto et al. (2025) menemukan pengaruh perencanaan anggaran terhadap kinerja pemerintah, sedangkan Alhabsi et al. (2023) dan Hidayati et al. (2023) mengkaji realisasi anggaran sebagai indikator kinerja keuangan. Nurhidayah et al. (2024) menemukan adanya variasi efektivitas realisasi anggaran antarperiode pada Dinas Pendidikan Kota Surakarta, tetapi penelitian tersebut terbatas pada satu organisasi perangkat daerah. Sementara itu, Putri et al. (2024) mengkaji peran mediasi realisasi anggaran dalam hubungan antara perencanaan dan kinerja instansi pemerintah. Perbedaan objek, periode, dan indikator yang digunakan menunjukkan bahwa hubungan antarvariabel tersebut perlu diuji dalam konteks yang lebih spesifik. Hingga konteks penelitian ini, kajian mengenai efektivitas realisasi anggaran sebagai variabel mediasi antara perencanaan anggaran dan kinerja pembangunan daerah pada Pemerintah Kota Surakarta periode 2020–2024 masih menjadi ruang penelitian yang perlu dieksplorasi. Kesenjangan ini penting dikaji karena penganggaran berbasis kinerja

membutuhkan keterpaduan antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi untuk mendukung akuntabilitas publik (Gharib et al., 2024; Jumardi, 2020).

Berdasarkan fenomena dan kesenjangan penelitian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh perencanaan anggaran terhadap kinerja pembangunan daerah serta menguji peran efektivitas realisasi anggaran sebagai variabel mediasi pada Pemerintah Kota Surakarta periode 2020–2024. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai keterkaitan antara alokasi anggaran, efektivitas realisasi, dan capaian pembangunan sebagai bahan pertimbangan dalam memperbaiki perencanaan serta pengelolaan belanja daerah. Secara akademis, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian manajemen keuangan daerah melalui bukti empiris mengenai hubungan antarvariabel tersebut dalam konteks pemerintah kota. Mengingat periode pengamatan hanya mencakup lima tahun, hasil penelitian akan diinterpretasikan secara hati-hati sesuai keterbatasan data dan tidak dimaksudkan untuk menghasilkan generalisasi yang luas.

2. Tinjauan Literatur

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan menjelaskan hubungan antara pemberi wewenang (principal) dan penerima wewenang (agent) yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan serta asimetri informasi. Dalam pemerintahan daerah, masyarakat dan pemerintah pusat bertindak sebagai principal, sedangkan pemerintah daerah sebagai agent yang bertanggung jawab mengelola keuangan dan melaksanakan pembangunan. Penganggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting) menjadi mekanisme pengendalian untuk menghubungkan alokasi sumber daya dengan hasil pembangunan sekaligus meningkatkan akuntabilitas sektor publik (Gharib et al., 2024). Sejalan dengan hal tersebut, Wiranto et al. (2025) membuktikan bahwa penganggaran berbasis kinerja berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, sedangkan Octariani dan Animah (2017) menemukan bahwa penerapannya berpengaruh signifikan terhadap kualitas anggaran. Dengan demikian, teori keagenan mendasari pentingnya perencanaan anggaran sebagai instrumen pengawasan terhadap agent guna mendorong pengelolaan keuangan yang akuntabel dan pencapaian kinerja pembangunan daerah.

Teori Pengendalian Anggaran (*Budgetary Control Theory*)

Teori pengendalian anggaran menjelaskan bahwa anggaran tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perencanaan, tetapi juga sebagai mekanisme pengendalian untuk memastikan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Putri et al. (2024) membuktikan bahwa realisasi anggaran menjadi mekanisme yang menghubungkan perencanaan dengan kinerja instansi, sedangkan Alif'ia et al. (2025) menemukan bahwa kualitas perencanaan dan pemahaman terhadap sistem keuangan berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Sejalan dengan itu, Fasihu et al. (2025) menunjukkan bahwa komitmen organisasi memperkuat hubungan antara pelaksanaan dan penyerapan anggaran. Temuan tersebut menegaskan bahwa efektivitas pengendalian anggaran ditentukan oleh keterpaduan aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, serta dukungan kelembagaan dan komitmen sumber daya manusia dalam mewujudkan kinerja yang optimal.

Teori Pengukuran Kinerja (*Performance Measurement Theory*)

Teori pengukuran kinerja sektor publik menekankan penggunaan indikator yang jelas dan terukur untuk menilai keberhasilan program pembangunan. Dalam pengelolaan keuangan daerah, kinerja pembangunan tidak hanya ditentukan oleh alokasi anggaran, tetapi juga oleh efektivitas realisasinya dalam menghasilkan output dan outcome. Hidayati et al. (2023) dan Alhabsi et al. (2023) menyatakan bahwa realisasi anggaran mencerminkan kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan Triyono (2002) menegaskan pentingnya aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas melalui pendekatan 3E audit. Sejalan dengan itu, Haraldsson (2024) menekankan bahwa integrasi pengelolaan anggaran dengan target kinerja dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, sementara Jumardi (2020) menunjukkan bahwa penganggaran berbasis kinerja mendorong efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya publik.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap Kinerja Pembangunan Daerah

Perencanaan anggaran merupakan tahap awal yang menentukan arah dan prioritas pembangunan daerah. Perencanaan yang cermat dan realistis akan memudahkan pelaksanaan program di lapangan, sehingga berdampak pada pencapaian target pembangunan. Anandah & Aufa (2023) menyatakan bahwa perencanaan anggaran yang baik akan meningkatkan efektivitas kinerja pemerintah daerah. Perencanaan anggaran sangat penting bagi pengelolaan keuangan daerah karena menjadi fondasi dalam menentukan alokasi sumber daya untuk program-program pembangunan (Aziz & Fitriaty, 2023). Oleh karena itu, pemerintah daerah harus menyusun perencanaan anggaran yang matang dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat agar dapat memberikan hasil kinerja pembangunan yang optimal (Roes, 2022).

Hasil penelitian terdahulu yang diteliti oleh Anandah & Aufa (2023) menunjukkan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas kinerja pemerintah daerah. Aziz & Fitriaty (2023) juga menemukan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi. Temuan serupa diungkapkan oleh Roes (2022) yang membuktikan bahwa perencanaan anggaran berdampak langsung pada peningkatan kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan informasi yang diberikan, maka dapat dibentuk hipotesis sebagai berikut:

H_1: Perencanaan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja pembangunan daerah pada Pemerintah Kota Surakarta periode 2020-2024.

Pengaruh Efektivitas Realisasi Anggaran terhadap Kinerja Pembangunan Daerah

Efektivitas realisasi anggaran mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah mampu melaksanakan program-program yang telah direncanakan sesuai dengan target yang ditetapkan. Hidayati *et al*. (2023) menyatakan bahwa realisasi anggaran merupakan cerminan langsung kinerja keuangan pemerintah daerah. Efektivitas realisasi anggaran sangat penting bagi pencapaian kinerja pembangunan karena menjadi indikator utama dalam menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan (Alhabsi *et al*., 2023). Oleh karena itu, pemerintah daerah harus

meningkatkan efektivitas realisasi anggaran agar rencana pembangunan dapat diwujudkan menjadi hasil nyata yang dirasakan masyarakat (Haraldsson, 2024).

Hasil penelitian terdahulu yang diteliti oleh Hidayati *et al*. (2023) menunjukkan bahwa realisasi anggaran memiliki hubungan yang erat dengan kinerja keuangan pemerintah daerah. Alhabsi *et al*. (2023) juga menemukan bahwa efektivitas realisasi anggaran menjadi indikator penting dalam menilai kinerja keuangan daerah. Haraldsson (2024) menegaskan bahwa pemerintah daerah yang mampu mengintegrasikan pengelolaan anggaran dengan target kinerja akan menghasilkan layanan publik yang berkualitas. Berdasarkan informasi yang diberikan, maka dapat dibentuk hipotesis sebagai berikut:

H_2: Efektivitas realisasi anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja pembangunan daerah pada Pemerintah Kota Surakarta periode 2020-2024.

Peran Mediasi Efektivitas Realisasi Anggaran dalam Pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap Kinerja Pembangunan Daerah

Perencanaan anggaran yang baik tidak serta-merta langsung meningkatkan kinerja pembangunan daerah, tetapi melalui mekanisme realisasi yang efektif. Putri *et al*. (2024) menyatakan bahwa realisasi anggaran berfungsi sebagai mekanisme transmisi yang menghubungkan perencanaan dengan kinerja instansi pemerintah. Perencanaan anggaran yang matang akan mendorong efektivitas realisasi, yang pada gilirannya akan meningkatkan kinerja pembangunan daerah (Alif'ia *et al*., 2025). Oleh karena itu, efektivitas realisasi anggaran menjadi variabel mediasi yang memediasi hubungan antara perencanaan anggaran dan kinerja pembangunan daerah (Fasihu *et al*., 2025).

Hasil penelitian terdahulu yang diteliti oleh Putri *et al*. (2024) menunjukkan bahwa realisasi anggaran berperan sebagai mekanisme transmisi yang menghubungkan perencanaan dengan kinerja instansi. Alif'ia *et al*. (2025) menemukan bahwa kualitas perencanaan berpengaruh terhadap penyerapan anggaran yang pada akhirnya menentukan kinerja yang dihasilkan. Fasihu *et al*. (2025) juga membuktikan bahwa komitmen organisasi memperkuat hubungan antara pelaksanaan anggaran dan penyerapan anggaran, sehingga efektivitas realisasi menjadi kunci dalam menentukan kinerja. Gharib *et al*. (2024) dalam kajian tematiknya menegaskan bahwa *performance-based budgeting* menekankan pentingnya integrasi antara perencanaan, realisasi, dan kinerja.

Sugiyanto & Subagiyo (2005) juga mengonfirmasi bahwa partisipasi dalam penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial secara tidak langsung, yakni melalui komitmen tujuan. Temuan ini sejalan dengan logika bahwa efektivitas realisasi anggaran dapat berperan sebagai jembatan antara perencanaan dan kinerja pembangunan daerah. Berdasarkan informasi yang diberikan, maka dapat dibentuk hipotesis sebagai berikut:

H_3: Efektivitas realisasi anggaran memediasi pengaruh perencanaan anggaran terhadap kinerja pembangunan daerah pada Pemerintah Kota Surakarta periode 2020-2024.

3. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian kausal-eksplanatori untuk menganalisis pengaruh perencanaan anggaran terhadap kinerja pembangunan daerah serta peran efektivitas realisasi anggaran sebagai variabel mediasi pada Pemerintah Kota Surakarta periode 2020–2024. Populasi

penelitian mencakup dokumen anggaran, laporan keuangan, dan indikator pembangunan daerah, sedangkan sampel berupa data tahunan selama lima tahun yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kelengkapan dan konsistensi data. Data sekunder diperoleh melalui dokumentasi APBD, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), serta indikator pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari BPS Kota Surakarta, DJPK Kementerian Keuangan, JDIH Provinsi Jawa Tengah, dan situs resmi Pemerintah Kota Surakarta. Kinerja Pembangunan Daerah sebagai variabel dependen diukur melalui indeks gabungan pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, dan IPM yang distandardisasi menggunakan metode z-score.

Perencanaan Anggaran sebagai variabel independen diukur berdasarkan persentase revisi anggaran terhadap total anggaran, dengan tingkat revisi yang lebih rendah menunjukkan kualitas perencanaan yang lebih baik (Anandah & Aufa, 2023; Aziz & Fitriaty, 2023; Roes, 2022). Sementara itu, Efektivitas Realisasi Anggaran sebagai variabel mediasi diukur menggunakan rasio efektivitas realisasi anggaran untuk menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan anggaran yang direncanakan (Hidayati et al., 2023; Alhabsi et al., 2023; Nurhidayah et al., 2024). Analisis data dilakukan melalui statistik deskriptif, uji asumsi klasik yang meliputi normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi, serta regresi linear berganda untuk menguji pengaruh langsung dan tidak langsung antarvariabel. Peran mediasi diuji menggunakan uji Sobel, sedangkan pengujian hipotesis mencakup uji t, uji F, dan koefisien determinasi. Seluruh pengujian menggunakan tingkat signifikansi 5%, dengan interpretasi hasil secara hati-hati mengingat jumlah observasi hanya lima data tahunan sehingga hasil penelitian bersifat terbatas dan tidak dapat digeneralisasikan secara luas.

4. Hasil Dan Pembahasan

Deskripsi Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa dokumen APBD, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan indikator kinerja pembangunan daerah Kota Surakarta periode 2020-2024. Secara keseluruhan, data yang terkumpul mencakup lima tahun observasi yang merepresentasikan dinamika pengelolaan keuangan daerah pasca pandemi COVID-19 hingga masa pemulihan ekonomi. Gambaran umum data penelitian disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Data Penelitian Periode 2020-2024

	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Perencanaan Anggaran (X)	Rp2.109.209.000.000	Rp1.974.610.000.000	Rp2.239.300.000.000	Rp2.365.330.000.000	Rp2.437.740.000.000
Efektivitas Realisasi (M)	77.74%	94.52%	93.26%	83.63%	90.24%
IPM	82.21	82.62	83.08	83.54	84.41
Kemiskinan	9.03%	9.40%	8.84%	8.44%	8.31%
Pertumbuhan Ekonomi	-1.76%	4.01%	6.25%	5.57%	5.61%

Sumber: Data diolah dari BPS Kota Surakarta dan DJPK Kemenkeu (2025)

Berdasarkan Tabel 1, APBD Murni (X) sebagai proksi perencanaan anggaran menunjukkan tren peningkatan dari Rp2.109,29 miliar pada 2020 menjadi Rp2.437,74 miliar pada 2024, atau sekitar 15,6%, yang mencerminkan peningkatan alokasi sumber daya fiskal untuk pembangunan daerah. Namun, efektivitas realisasi anggaran (M) mengalami fluktuasi, dari 77,74% pada 2020 meningkat menjadi 94,52% pada 2021, kemudian menurun menjadi 93,26% pada 2022 dan 83,63% pada 2023, sebelum kembali meningkat menjadi 90,24% pada 2024. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan anggaran tidak selalu diikuti oleh peningkatan efektivitas realisasi. Sementara itu, indikator kinerja pembangunan daerah memperlihatkan perkembangan yang beragam, ditandai dengan peningkatan IPM dari 82,21 menjadi 84,41, penurunan tingkat kemiskinan dari puncak 9,40% pada 2021 menjadi 8,31% pada 2024, serta pemulihan pertumbuhan ekonomi dari kontraksi sebesar -1,76% pada 2020 hingga mencapai 6,25% pada 2022, sebelum melambat menjadi sekitar 5,6% pada 2023–2024. Untuk memperoleh ukuran kinerja pembangunan daerah yang lebih komprehensif, ketiga indikator tersebut selanjutnya dikombinasikan menjadi satu indeks menggunakan metode z-score agar perbedaan skala dan satuan pengukuran dapat disetarakan. Hasil perhitungan indeks tersebut disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Indeks Z-Score Kinerja Pembangunan Daerah (Y-Indeks)

	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Z-IPM	-1.1285	-0.6476	-0.1079	0.4317	1.45229
Z-Kemiskinan	0.51044	1.34612	0.08131	-0.8221	-1.1158
Z-Kemiskinan (dibalik)	-0.51	-1.35	-0.08	0.82	1.12
Z-Pertumbuhan Ekonomi	-1.7317	0.0225	0.7035	0.49677	0.50893
Y-Indeks	-1.12	-0.66	0.17	0.58	1.03

Sumber: *Output* SPSS (2025)

Indeks kinerja pembangunan daerah (Y-Indeks) Kota Surakarta menunjukkan tren peningkatan selama periode 2020–2024, dari nilai terendah sebesar -1,12 pada 2020 yang mencerminkan tekanan pandemi COVID-19 terhadap pembangunan, menjadi -0,66 pada 2021, kemudian meningkat ke wilayah positif sebesar 0,17 pada 2022 hingga mencapai 1,03 pada 2024. Perkembangan tersebut mengindikasikan perbaikan capaian pembangunan daerah dan secara deskriptif sejalan dengan peningkatan alokasi APBD (Haraldsson, 2024). Untuk memberikan gambaran lebih terperinci mengenai karakteristik data yang dianalisis, Tabel 3 menyajikan statistik deskriptif setiap variabel penelitian.

Tabel 3. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum
Besaran APBD Murni (X)	5	Rp1.974,61 miliar	Rp2.437,74 miliar
Efektivitas Realisasi (M)	5	77.74%	94.52%
IPM	5	82.21	84.41
Kemiskinan	5	8.31%	9.40%
Pertumbuhan Ekonomi	5	-1.76%	6.25%

Sumber: *Output* SPSS (2025)

Dari Tabel 3, nilai standar deviasi efektivitas realisasi anggaran (M) sebesar 7.06% relatif tinggi dibandingkan dengan nilai rata-ratanya (87.88%). Hal ini mengkonfirmasi bahwa fluktuasi realisasi anggaran selama periode penelitian

memang cukup signifikan. Demikian pula dengan pertumbuhan ekonomi yang memiliki standar deviasi 3.29%, mencerminkan tingginya variabilitas kinerja ekonomi akibat goncangan pandemi dan proses pemulihannya. Sementara itu, IPM dan tingkat kemiskinan memiliki standar deviasi yang relatif kecil (0.85 dan 0.44), menunjukkan bahwa kedua indikator ini bergerak secara lebih stabil dan cenderung menunjukkan tren gradual.

Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan analisis regresi berganda, model perlu diuji untuk memastikan bahwa model memenuhi asumsi klasik yang dipersyaratkan. Hasil uji asumsi klasik disajikan secara lengkap pada Lampiran 2.

Hasil uji normalitas menunjukkan nilai signifikasi residual pada seluruh model lebih besar dari 0.05 sehingga residual berdistribusi normal. Uji multikolinearitas menunjukkan nilai *tolerance* lebih besar dari 0.10 dan VIF (*Variance Inflation Factor*) lebih kecil dari 10, yang berarti tidak ditemukan indikasi multikolinearitas antar variabel independen. Selanjutnya, uji heterokesdatisitas (Glejser) menunjukkan nilai signifikansi seluruh variabel independen lebih besar 0.05, sehingga model terbebas dari heteroskedastisitas. Uji autokorelasi (Durbin-Watson) menghasilkan nilai yang berada di sekitar angka 2.

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, tidak ditemukan indikasi pelanggaran asumsi klasik pada model penelitian (Wiranto *et al*., 2025). Namun demikian, hasil tersebut tetap perlu diinterpretasikan secara hati-hati mengingat jumlah observasi yang sangat terbatas (n=5).

Hasil Analisis Regresi dan Uji Mediasi

Pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap Efektivitas Realisasi

Langkah pertama dalam kerangka analisis mediasi adalah menguji apakah variabel independen (besaran APBD Murni) berpengaruh terhadap variabel mediasi (efektivitas realisasi anggaran). Hasil analisis regresi sederhana untuk jalur $X \rightarrow M$ disajikan pada Tabel 4..

Tabel 4. Hasil Regresi Pengaruh X terhadap M

Variabel	Koefisien (B)	Std. Error	t hitung	Sig.
(Constant)	95.865	48.201	1.989	0.141
Besaran APBD Murni (X)	-3.59E-12*	0	-0.166	0.879

R^2 = 0.009; *Adjusted* R^2 = -0.321; F = 0.879

Sumber: *Output* SPSS (2025)

Berdasarkan Tabel 4., besaran APBD Murni (X) tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas realisasi anggaran (M), sebagaimana ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,879 > 0,05 dan koefisien regresi sebesar -3,589E-12. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,009 menunjukkan bahwa APBD Murni hanya mampu menjelaskan 0,9% variasi efektivitas realisasi anggaran, sedangkan 99,1% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan besaran anggaran belum terbukti berkaitan secara signifikan dengan efektivitas penyerapannya, sehingga hubungan awal yang diperlukan untuk mendukung efek mediasi belum memperoleh bukti empiris yang memadai (Putri et al., 2024). Namun, karena penelitian hanya menggunakan lima observasi selama periode 2020–2024, hasil tersebut perlu ditafsirkan secara hati-hati. Fluktuasi realisasi anggaran diduga berkaitan dengan faktor lain, seperti kapasitas sumber daya

manusia, kompleksitas pengadaan, dan perubahan kebijakan selama tahun anggaran, meskipun faktor-faktor tersebut tidak diuji secara langsung dalam penelitian ini.

Pengaruh Besaran APBD Murni (X) terhadap Kinerja Pembangunan Daerah (Y)

Langkah kedua adalah menguji apakah besaran APBD Murni berpengaruh langsung terhadap kinerja pembangunan daerah. Hasil analisis dirangkum dalam Tabel 5.

Tabel 5. Ringkasan Pengaruh Langsung X terhadap Y

Model (Y)	Koefisien (B)	Std. Error	t hitung	Sig.	R^2	Keterangan
IPM	3.99E-12	0	3.195	0.05	0.773	Signifikan pada batas kritis 5%
Kemiskinan	-2.34E-12	0	-16.82	0	0.99	Signifikan pada a= 1%
Pertumbuhan Ekonomi	8.92E-12	0	1.025	0.381	0.26	Tidak signifikan

Sumber: *Output* SPSS (2025)

Catatan pada Tabel 5 menunjukkan bahwa koefisien regresi dalam notasi ilmiah (E-12) muncul akibat penggunaan satuan rupiah pada variabel APBD Murni, tanpa mengubah interpretasi arah dan signifikansi hubungan. Hasil analisis menunjukkan bahwa APBD Murni berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan (p = 0,000) dan IPM (p = 0,050), dengan pengaruh terhadap IPM berada tepat pada batas signifikansi 5%, sedangkan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi tidak signifikan (p = 0,381) (Anandah & Aufa, 2023; Roes, 2022). Temuan ini mengindikasikan bahwa perubahan besaran APBD selama periode 2020–2024 memiliki hubungan statistik dengan tingkat kemiskinan dan IPM, tetapi belum menunjukkan hubungan yang signifikan dengan pertumbuhan ekonomi. Pola tersebut diduga berkaitan dengan alokasi belanja daerah untuk program sosial, pendidikan, dan kesehatan. Namun, hasil ini perlu ditafsirkan secara hati-hati karena hanya didasarkan pada lima observasi tahunan sehingga belum cukup kuat untuk menyimpulkan hubungan kausal maupun menggeneralisasikan temuan secara luas.

Pengaruh Efektivitas Realisasi Anggaran (M) terhadap Kinerja Pembangunan Daerah (Y)

Langkah ketiga adalah menguji apakah efektivitas realisasi anggaran (M) berpengaruh terhadap kinerja pembangunan daerah (Y) setelah mengontrol pengaruh besaran APBD Murni (X). Hasil analisis regresi berganda dirangkum dalam Tabel 6.

Tabel 6. Ringkasan Pengaruh M terhadap Y (dengan kontrol X)

Model (Y)	Koefisien M (B)	Std. Error	t hitung	Sig.	Keterangan
IPM	0.045	0.025	1.793	0.215	Tidak signifikan
Kemiskinan	0.005	0.003	2.081	0.173	Tidak signifikan
Pertumbuhan Ekonomi	0.365	0.12	3.054	0.093	Tidak signifikan

Sumber: *Output* SPSS (2025)

Berdasarkan Tabel 6, efektivitas realisasi anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap ketiga indikator kinerja pembangunan daerah, dengan nilai signifikansi masing-masing sebesar 0,215; 0,173; dan 0,093 yang seluruhnya melebihi tingkat

signifikansi 5%. Meskipun nilai signifikansi pertumbuhan ekonomi berada di bawah 10%, hasil tersebut tetap tidak signifikan berdasarkan kriteria konvensional 5%. Temuan ini menunjukkan bahwa tingginya tingkat realisasi anggaran belum terbukti berkaitan secara signifikan dengan peningkatan IPM, penurunan kemiskinan, maupun pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta selama periode 2020–2024. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa capaian pembangunan tidak hanya bergantung pada besarnya penyerapan anggaran, tetapi kemungkinan juga dipengaruhi oleh kualitas belanja (quality of spending) dan ketepatan alokasi program pembangunan (Alhabsi et al., 2023; Triyono, 2002). Namun, karena kualitas belanja tidak diukur dalam penelitian ini dan jumlah observasi terbatas, interpretasi tersebut masih bersifat sementara.

Pengujian Peran Mediasi Efektivitas Realisasi Anggaran

Berdasarkan hasil pengujian, efektivitas realisasi anggaran (M) tidak terbukti memediasi hubungan antara besaran APBD Murni (X) dan kinerja pembangunan daerah (Y) di Kota Surakarta periode 2020–2024. Hal ini ditunjukkan oleh tidak signifikannya pengaruh APBD Murni terhadap efektivitas realisasi anggaran maupun pengaruh efektivitas realisasi anggaran terhadap kinerja pembangunan daerah. Dengan demikian, jalur mediasi belum memperoleh dukungan empiris dalam penelitian ini (Alif'ia et al., 2025; Fasihu et al., 2025). Namun, kesimpulan tersebut perlu ditafsirkan secara hati-hati karena jumlah observasi hanya lima data tahunan, sehingga pengujian mediasi formal, seperti uji Sobel atau bootstrap, belum dapat menghasilkan estimasi yang andal. Oleh karena itu, tidak ditemukannya efek mediasi dipahami sebagai keterbatasan bukti empiris, bukan kepastian bahwa efek mediasi sama sekali tidak ada.

Ringkasan Pengujian Hipotesis

Tabel 7. Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis	Jalur	Sig.	Keputusan
H1a	X terhadap IPM	0.05	Diterima (pada batas kritis 5%)
H1b	X terhadap Kemiskinan	0	Diterima
H1c	X terhadap Pertumbuhan Ekonomi	0.381	Ditolak
H2a	M terhadap IPM	0.215	Ditolak
H2b	M terhadap Kemiskinan	0.173	Ditolak
H2c	M terhadap Pertumbuhan Ekonomi	0.093	Ditolak
H3	Peran mediasi M dalam hubungan X terhadap Y	-	Ditolak

Sumber: *Output* SPSS (2025) untuk H1a-H2c; analisis penulis untuk H3

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, penelitian ini menunjukkan bahwa besaran APBD Murni yang diproksikan sebagai perencanaan anggaran memiliki hubungan yang lebih nyata dengan dimensi pembangunan sosial (IPM dan tingkat kemiskinan) dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, efektivitas realisasi anggaran tidak terbukti berhubungan secara signifikan dengan ketiga indikator kinerja serta tidak mampu berperan sebagai variabel mediasi.

Pembahasan

Keterbatasan Data dan Interpretasi Hasil

Penelitian ini menggunakan data time series selama lima tahun (2020–2024) yang mencakup periode pandemi COVID-19 dan pemulihan pascapandemi untuk menggambarkan dinamika pengelolaan keuangan daerah di Kota Surakarta. Namun, keterbatasan jumlah observasi menyebabkan rendahnya statistical power, sehingga hasil pengujian rentan terhadap perubahan data dan perlu diinterpretasikan secara hati-hati, terutama pada hubungan yang memiliki nilai signifikansi mendekati batas kritis (Triyono, 2002). Selain itu, penelitian ini tidak memasukkan variabel kontrol, padahal kinerja pembangunan daerah juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro, kebijakan pemerintah pusat, serta dana transfer seperti DAU, DAK, dan DBH (Haraldsson, 2024; Alhabsi et al., 2023; Hidayati et al., 2023).

Pengukuran perencanaan anggaran yang hanya didasarkan pada besaran APBD Murni belum mencerminkan kualitas perencanaan secara menyeluruh, termasuk ketepatan waktu penyusunan, partisipasi pemangku kepentingan, dan kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat (Anandah & Aufa, 2023; Aziz & Fitriaty, 2023). Demikian pula, efektivitas realisasi anggaran yang diukur berdasarkan rasio serapan belum menggambarkan kualitas belanja (quality of spending), efisiensi, ketepatan sasaran, dan keberhasilan program dalam mencapai outcome pembangunan (Nurhidayah et al., 2024; Roes, 2022). Oleh karena itu, hasil penelitian ini bersifat indikatif dan eksploratif serta belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan hubungan kausal atau melakukan generalisasi secara luas. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan periode pengamatan yang lebih panjang, menambahkan variabel kontrol, serta mengembangkan indikator pengukuran yang lebih komprehensif agar hasil analisis lebih kuat dan andal (Putri et al., 2024; Wiranto et al., 2025).

Interpretasi Hubungan Antar Variabel Penelitian

Hasil analisis regresi menunjukkan tiga pola hubungan antarvariabel. Pertama, besaran APBD Murni sebagai proksi perencanaan anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas realisasi anggaran ($p = 0{,}879$; $R^2 = 0{,}009$), sehingga besarnya anggaran belum mampu menjelaskan fluktuasi tingkat serapan selama 2020–2024. Temuan ini mengindikasikan adanya kemungkinan kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran, sejalan dengan Alif'ia et al. (2025) yang menyatakan bahwa kualitas perencanaan saja belum menjamin tingginya penyerapan anggaran, serta Fasihu et al. (2025) yang menekankan pentingnya komitmen organisasi. Kedua, perencanaan anggaran menunjukkan hubungan signifikan dengan IPM ($p = 0{,}050$; $R^2 = 0{,}773$) dan tingkat kemiskinan ($p = 0{,}000$; $R^2 = 0{,}990$), tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi ($p = 0{,}381$; $R^2 = 0{,}260$). Hubungan positif dengan IPM dan negatif dengan kemiskinan diduga berkaitan dengan alokasi anggaran untuk pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pemberdayaan ekonomi, sejalan dengan Anandah dan Aufa (2023), Roes (2022), serta Aziz dan Fitriaty (2023). Sementara itu, tidak signifikannya hubungan dengan pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi oleh keterbatasan realisasi belanja produktif serta faktor eksternal, seperti kondisi ekonomi nasional dan inflasi (Putri et al., 2024; Haraldsson, 2024). Meskipun demikian, hasil tersebut menunjukkan hubungan statistik dan belum cukup untuk memastikan hubungan kausal karena jumlah observasi terbatas.

Ketiga, efektivitas realisasi anggaran tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap IPM ($p = 0{,}215$), tingkat kemiskinan ($p = 0{,}173$), maupun pertumbuhan ekonomi ($p = 0{,}093$) pada tingkat signifikansi 5%. Temuan ini mengindikasikan bahwa

tingginya serapan anggaran tidak selalu diikuti oleh peningkatan capaian pembangunan karena keberhasilan program juga bergantung pada kualitas belanja (quality of spending), efisiensi, dan ketepatan sasaran (Jumardi, 2020; Triyono, 2002). Selain itu, sumber pendanaan alternatif, seperti DAU, DAK, dan DBH, serta jeda waktu antara pelaksanaan program dan munculnya dampak pembangunan dapat memengaruhi hubungan tersebut (Nurhidayah et al., 2024; Triyono, 2002). Hasil ini berbeda dari Hidayati et al. (2023) dan Alhabsi et al. (2023), yang mengaitkan realisasi anggaran dengan kinerja keuangan pemerintah daerah, tetapi perbedaan tersebut perlu dipahami karena penelitian ini berfokus pada outcome pembangunan, bukan semata-mata rasio keuangan. Dengan tidak signifikannya hubungan antara perencanaan anggaran dan efektivitas realisasi serta antara efektivitas realisasi dan indikator pembangunan, peran efektivitas realisasi anggaran sebagai variabel mediasi belum memperoleh dukungan empiris dalam penelitian ini. Namun, kesimpulan tersebut perlu ditafsirkan secara hati-hati mengingat keterbatasan lima observasi tahunan.

Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya

Temuan penelitian ini menunjukkan perbedaan dengan sejumlah penelitian terdahulu, khususnya terkait peran efektivitas realisasi anggaran dalam menghubungkan perencanaan anggaran dengan kinerja. Putri et al. (2024) menemukan bahwa realisasi anggaran memediasi hubungan antara perencanaan dan kinerja instansi pemerintah pusat, sedangkan penelitian ini tidak menemukan bukti mediasi karena hubungan perencanaan dengan realisasi maupun realisasi dengan kinerja pembangunan tidak signifikan. Perbedaan serupa terlihat dibandingkan penelitian Hidayati et al. (2023) di Kota Bogor dan Alhabsi et al. (2023) di Kabupaten Magelang yang mengkaji kinerja keuangan melalui rasio efektivitas dan efisiensi, sedangkan penelitian ini menggunakan indikator outcome pembangunan berupa IPM, tingkat kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi berbagai faktor di luar anggaran. Sementara itu, Wiranto et al. (2025) menemukan bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran berpengaruh simultan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah di Kota Jambi. Perbedaan periode pengamatan dan indikator kinerja dapat menjadi salah satu penjelasan atas variasi hasil tersebut. Dalam konteks Kota Surakarta, penelitian ini memperluas temuan Nurhidayah et al. (2024) mengenai fluktuasi realisasi anggaran dengan menunjukkan bahwa variasi tersebut juga terlihat pada tingkat pemerintah kota secara agregat, tetapi tidak terbukti berhubungan signifikan dengan capaian pembangunan daerah.

Hasil penelitian ini juga perlu dikaitkan dengan temuan Alif'ia et al. (2025) mengenai pentingnya kualitas perencanaan dan pemahaman sistem keuangan serta Fasihu et al. (2025) mengenai peran komitmen organisasi dalam penyerapan anggaran. Meskipun variabel-variabel tersebut tidak diuji secara langsung, temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa besaran APBD saja belum cukup untuk menjelaskan efektivitas realisasi anggaran. Hal tersebut sejalan dengan Gharib et al. (2024) yang mengidentifikasi tantangan dalam menyelaraskan perencanaan dan pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja, serta Haraldsson (2024) yang menekankan pentingnya integrasi pengelolaan anggaran dengan target kinerja. Secara keseluruhan, perbedaan hasil antarpenelitian menunjukkan bahwa hubungan perencanaan, realisasi, dan kinerja pembangunan bersifat kontekstual serta dipengaruhi oleh tingkat pemerintahan, kondisi ekonomi, kapasitas birokrasi, dan

indikator yang digunakan. Kontribusi penelitian ini terletak pada temuan bahwa selama periode 2020–2024, efektivitas realisasi anggaran belum terbukti menjadi penghubung antara perencanaan anggaran dan kinerja pembangunan daerah di Kota Surakarta. Namun, kesimpulan tersebut perlu ditafsirkan secara hati-hati mengingat keterbatasan jumlah observasi yang hanya mencakup lima tahun.

Implikasi Terbatas Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan berupa jumlah observasi yang hanya lima tahun (2020–2024) dan tidak adanya variabel kontrol, sehingga implikasinya bersifat indikatif dan memerlukan verifikasi lebih lanjut. Secara teoritis, temuan ini menunjukkan bahwa hubungan perencanaan, realisasi, dan kinerja pembangunan tidak selalu berlangsung secara linear sebagaimana diasumsikan dalam Budgetary Control Theory dan Principal-Agent Theory, sejalan dengan Gharib et al. (2024) yang menyoroti kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Secara praktis, Pemerintah Kota Surakarta perlu menyusun APBD berdasarkan kebutuhan riil dan kapasitas pelaksana, meminimalkan revisi anggaran yang tidak diperlukan, serta mengutamakan kualitas belanja dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat daripada sekadar mengejar tingkat penyerapan anggaran (Anandah & Aufa, 2023; Roes, 2022; Haraldsson, 2024). Selain itu, evaluasi realisasi dan capaian pembangunan perlu diintegrasikan ke dalam Musrenbang agar program yang kurang efektif dapat diperbaiki pada periode berikutnya (Wiranto et al., 2025). Penelitian selanjutnya disarankan memperpanjang periode pengamatan, menggunakan indikator yang lebih komprehensif, menambahkan variabel kontrol, memperluas analisis hingga tingkat organisasi perangkat daerah (OPD), serta mengkaji faktor seperti kualitas belanja, komitmen organisasi, dan kapasitas sumber daya manusia (Alif'ia et al., 2025; Fasihu et al., 2025; Putri et al., 2024).

5. Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perencanaan anggaran yang diproksikan melalui besaran APBD Murni berpengaruh signifikan terhadap IPM (p = 0,050) dan tingkat kemiskinan (p = 0,000), tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (p = 0,381). Sementara itu, efektivitas realisasi anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM, kemiskinan, maupun pertumbuhan ekonomi, serta tidak terbukti memediasi hubungan antara perencanaan anggaran dan kinerja pembangunan daerah di Kota Surakarta periode 2020–2024. Temuan ini perlu ditafsirkan secara hati-hati karena penelitian hanya menggunakan lima observasi tahunan, proksi perencanaan yang terbatas, tidak adanya variabel kontrol, dan data agregat tingkat kota sehingga hasilnya bersifat indikatif serta belum dapat membuktikan hubungan kausal. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Surakarta disarankan memperkuat perencanaan anggaran yang realistis, meningkatkan kualitas belanja berbasis prinsip value for money, serta mengintegrasikan evaluasi realisasi dan capaian pembangunan ke dalam penyusunan anggaran berikutnya. Penelitian selanjutnya diharapkan memperpanjang periode pengamatan, menggunakan indikator perencanaan yang lebih komprehensif, menambahkan variabel kontrol, memperluas analisis hingga tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta melengkapi analisis kuantitatif dengan pendekatan kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam.

6. Daftar Pustaka

Alhabsi, R. H., Priyono, N., & Bharata, R. W. (2023). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2021. Jurnal Riset Akuntansi, 1(2), 212–222. https://doi.org/10.54066/jura-itb.v1i2.523

Alif'ia, N. F., Hartati, S., & Febriantoko, J. (2025). Analisis Kinerja Penyerapan Anggaran di Pemerintah Daerah: Studi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Jurnal Akuntansi dan Ekonomika, 15(2). https://doi.org/10.37859/jae.v15i2.9931

Anandah, N. A., & Aufa, M. (2023). PENGARUH PERENCANAAN ANGGARAN DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP EFEKTIVITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GRESIK. In Jurnal Akuntansi AKTIVA (Vol. 4, Number 1).

Aziz, A., & Fitriaty. (2023). PENGARUH PERENCANAAN ANGGARAN, TATA KELOLA DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KINERJA KPU PROVINSI JAMBI. Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan (Mankeu, 12(03).

Fasihu, L. O. M. S., Safaruddin, S., Zaikin, M., Mutmainnah, M., & Safitri, N. E. (2025). Boosting budget absorption: How organizational commitment enhances budget implementation in Indonesian local government. Priviet Social Sciences Journal, 5(11), 105–114. https://doi.org/10.55942/pssj.v5i11.760

Gharib, N. S. M., Saleh, Z., & Isa, C. R. (2024). A Thematic Review on Performance-Based Budgeting in the Public Sector Organisation. IPN Journal of Research and Practice in Public Sector Accounting and Management, 14(2), 1–31. https://doi.org/10.58458/ipnj.v14.02.01.0104

Haraldsson, M. (2024). Financial and non-financial performance measurement at the municipal group level – Evidence from municipal budgets in Sweden. Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management, 37(6), 28–48. https://doi.org/10.1108/JPBAFM-06-2024-0092

Hidayati, N., Gaol, L. L., & Suryani, P. (2023). Menelaah Penilaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Laporan Realisasi Anggaran: Studi Pada Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2021. Disclosure: Journal of Accounting and Finance, 3. https://doi.org/10.29240/disclosure.v1i2.2861

Jumardi. (2020). Assessing the Effectiveness of Performance-Based Budgeting in Achieving Public Sector Financial Goals. https://thejoas.com/index.php/

Nurhidayah, A., Bremara, N. P., & Dewi, M. W. (2024). ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI REALISASI ANGGARAN BELANJA PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA TAHUN 2019-2022. Jurnal Akuntansi dan Pajak, 1–5.

Octariani, A., & Animah, D. (2017). ANGGARAN BERBASIS KINERJA, SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS ANGGARAN SKPD (Suatu Pengujian Struktural). In Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia (Vol. 2, Number 1).

Putri, D. R. P., Purwoko, B., & Bahri, S. (2024). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran dan Perubahan Regulasi terhadap Penyerapan Anggaran dan Dampaknya terha dap Kinerja Instansi (The Effect of Budget Planning, Budget Implementation, and Regulation Changes on Budget Absorption and its Impacts on Institution Performance).

Roes, R. (2022). PERENCANAAN DAN EVALUASI ANGGARAN SERTA STANDAR BIAYA PENGARUHNYA TERHADAP KINERJA ORGANISASI DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR.

Sugiyanto, E., & Subagiyo, L. (2005). PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN TERHADAP KINERJA MANAJERIAL: KOMITMEN TUJUAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (STUDI EMPIRIS PADA RUMAH SAKIT TIPE A, B, DAN C, DI JAWA TENGAH DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA). In BENEFIT (Vol. 9, Number 1).

Triyono. (2002). EVALUASI KINERJA PEMERINTAH DAERAH.

Wiranto, F., Kusumastuti, R., & Jumaili, S. (2025). The Influence of Performance-Based Budgeting Application on Performance Accountability of Jambi City Government Agencies. International Journal of Asian Business and Management, 4(3), 717–730. https://doi.org/10.55927/ijabm.v4i3.313